

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan secara umum telah sesuai dengan peraturan. Perencanaan meliputi RKP disusun oleh Sekretaris Nagari yang kemudian disampaikan kepada Wali Nagari untuk dibahas bersama Bamus. Pelaksanaan keuangan nagari telah dilakukan melalui rekening kas nagari yang didukung oleh bukti-bukti yang sah, dan pelaksanaan mengenai pengeluaran nagari telah dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti RAB dan SPP. Penatausahaan sebagai kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Nagari telah dilakukan dengan baik, meskipun masih terdapat Bendahara Nagari yang tidak melakukannya. Penyampaian pelaporan berupa laporan semester pertama dan semester akhir oleh Wali Nagari kepada Bupati masih terlambat. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari yang seharusnya disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati namun disampaikan oleh perangkat nagari yang lain.
2. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kelima aspek pengelolaan keuangan nagari didapatkan bahwa 3 dari 5 aspek tersebut telah akuntabel, sedangkan 2 aspek lainnya tidak akuntabel. Sedangkan hasil untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pada setiap nagari didapatkan bahwa 20 dari 23 nagari telah akuntabel, dan sisanya yakni 3 nagari dinyatakan tidak akuntabel. Hal ini berarti bahwa 87% nagari dari semua nagari yang ada telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Nagari yang tidak akuntabel tersebut dikarenakan masalah internal nagari, yakni seringkali pertukaran (*reshuffle*) perangkat nagari sehingga terjadinya kekosongan jabatan untuk sementara waktu. Hal ini menyebabkan kelancaran sistem dan kinerja di nagari tersebut menjadi terganggu sampai adanya pengganti dari perangkat nagari yang kosong tersebut. Selain itu, kompetensi perangkat nagari

juga mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari. Kompetensi ini bisa ditingkatkan dengan adanya pelatihan dan sosialisasi serta pengalaman dalam melaksanakan tugas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat dikemukakan saran, yakni dalam mengelola keuangan nagari hendaknya didasarkan pada peraturan yang berlaku baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga pengelolaan keuangan nagari dapat dikelola secara efektif dan efisien, serta selalu tingkatkan kemampuan sumber daya perangkat nagari.

